

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN GIANYAR TA 2014

Denpasar, Kamis (4/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, I Wayan Tagel Winarta dan Bupati Gianyar, A.A. Gde Agung Bharata, **BPK menyatakan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2014.** Opini ini meningkat dari tahun lalu dimana Kabupaten Gianyar memperoleh opini pemeriksaan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar TA 2014, BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kabupaten Gianyar, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar tersebut, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Piutang Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan pada Dinas Pendapatan Tidak Memadai;
2. Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Gianyar Belum Memadai;
3. Pengelolaan Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Gianyar Belum Memadai;
4. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Gianyar Belum Memadai;
5. Pengelolaan Hutang pada UPT Kesmas dan RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar Kurang Memadai.

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam laporan kami berupa temuan kepatuhan sebagai berikut :

1. Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Belum Ditentukan Statusnya;
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gianyar; dan
3. Kesalahan Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Pengelolaan Aset dan Perwat.

Namun, BPK juga mengapresiasi upaya perbaikan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Gianyar, dimana sebagian besar tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah sesuai dengan *action plan* yang dibuat oleh Bupati Gianyar, sehingga dalam LKPD TA 2014 terjadi perbaikan dalam penyajian laporan keuangan.

BPK akan tetap mendorong Pemerintah Kabupaten Gianyar untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Humas BPK Perwakilan Provinsi Bali
Ida Ayu Putu Risnawati (Kepala Subbagian Humas dan TU)
Telp. +62 361 229193 • Fax. +62 361 229184, 256205
Web. <http://denpasar.bpk.go.id>
Email. dayu_risna@yahoo.com